



Kemiskinan Perkotaan sebagai Fenomena Multidimensional: Dinamika dan Strategi Bertahan Kelompok Rentan di Permukiman Sempadan Sungai Cibeureum, Kota Bandung

Danapati Putri¹, Rudy Kurniawan², Suci Wahyu Fajriani³, Lisy Septiani Putri⁴

Universitas Sriwijaya, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi : pdanapati@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 09 Mei 2026

ABSTRACT

Urban poverty in Bandung City is a multidimensional phenomenon influenced by the interaction of economic, social, and spatial factors. This study aims to analyze the forms, causes, and dynamics of poverty as well as survival strategies of vulnerable groups in the riverbank settlement of Sungai Cibeureum. A qualitative approach with case study strategy was employed through observation and interviews with 30 informants. The results show that poverty manifests in physical limitations of dwellings, economic instability due to the dominance of the informal sector, and limited access to basic services. The main causes of poverty include high land prices, urbanization, and limited policies that have not yet been inclusive. The dynamics of poverty are influenced by income uncertainty and vulnerability to environmental risks such as flooding. Communities develop survival strategies through the utilization of social networks, proximity to livelihood sources, and adaptation to constraints. These findings affirm that urban poverty is a dynamic and spatially embedded process.

Keywords: Urban poverty; multidimensional poverty; vulnerable groups; slum settlements; survival strategies.

ABSTRAK

Kemiskinan perkotaan di Kota Bandung merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi faktor ekonomi, sosial, dan spasial. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk, penyebab, dan dinamika kemiskinan serta strategi bertahan kelompok rentan di permukiman sempadan Sungai Cibeureum. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan strategi studi kasus melalui observasi dan wawancara terhadap 30 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan termanifestasi dalam keterbatasan fisik hunian, ketidakstabilan ekonomi akibat dominasi sektor informal, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Penyebab utama kemiskinan meliputi tingginya harga lahan, urbanisasi, dan keterbatasan kebijakan yang belum inklusif. Dinamika kemiskinan dipengaruhi oleh ketidakpastian pendapatan dan kerentanan terhadap risiko lingkungan seperti banjir. Masyarakat mengembangkan strategi bertahan melalui pemanfaatan jaringan sosial, kedekatan dengan sumber penghidupan, dan adaptasi terhadap keterbatasan. Temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan perkotaan merupakan proses yang dinamis dan terikat secara spasial.

Kata Kunci: Kemiskinan perkotaan; kemiskinan multidimensional; kelompok rentan; permukiman kumuh; strategi bertahan.

PENDAHULUAN

Urbanisasi di kota-kota besar negara berkembang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial dan spasial dalam struktur perkotaan. Di Kota Bandung, peningkatan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 2,5 juta jiwa dengan kepadatan di atas 15.000 jiwa/km² menunjukkan tingginya tekanan terhadap ruang kota dan kapasitas layanan dasar. Arus urbanisasi yang terus berlangsung termasuk masuknya ribuan pendatang setiap tahun yang tidak selalu diiringi dengan ketersediaan hunian layak dan kesempatan ekonomi yang memadai. Kondisi ini mendorong berkembangnya permukiman informal di ruang-ruang marginal, seperti sempadan sungai, yang menjadi salah satu manifestasi nyata dari kemiskinan perkotaan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan perkotaan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi sebagai fenomena multidimensional yang berkaitan dengan ketimpangan akses terhadap ruang, infrastruktur, dan layanan kota (UN-Habitat, 2020). Di satu sisi, Kota Bandung menunjukkan tren penurunan luas kawasan kumuh dari 468,03 hektare pada tahun 2021 menjadi sekitar 269,49 hektare pada tahun 2024 – yang mencerminkan adanya intervensi kebijakan penataan kota. Namun di sisi lain, keberadaan kawasan kumuh yang masih mencakup sekitar 1,3% wilayah kota mengindikasikan bahwa persoalan tersebut belum sepenuhnya terselesaikan, terutama jika dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Selain itu, meskipun tingkat kemiskinan di Kota Bandung menunjukkan tren penurunan, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 99,12 ribu jiwa (3,78%) pada Maret 2025, indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan tetap menunjukkan adanya kerentanan yang signifikan di antara kelompok miskin. Hal ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga dengan tingkat ketimpangan dan kapasitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, dimensi spasial menjadi penting, karena kelompok miskin cenderung terkonsentrasi pada kawasan-kawasan dengan akses terbatas terhadap layanan dasar dan lingkungan yang rentan.

Salah satu kawasan yang merepresentasikan kondisi tersebut adalah permukiman sempadan Sungai Cibeureum di Kelurahan Isola. Kawasan ini berkembang secara informal dengan kondisi fisik yang tidak memadai, ditandai oleh kepadatan tinggi, kualitas hunian yang rendah, serta keterbatasan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan drainase. Masyarakat yang tinggal di kawasan ini umumnya bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil, sehingga memperkuat kondisi kerentanan ekonomi yang mereka alami. Dalam perspektif sosiologi perkotaan, kondisi ini mencerminkan proses marginalisasi spasial, di mana kelompok berpenghasilan rendah terdorong untuk menempati ruang-ruang yang kurang layak akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya kota.

Namun demikian, masyarakat di kawasan ini tidak sepenuhnya berada dalam posisi pasif. Mereka mengembangkan berbagai strategi bertahan sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan struktural, seperti memanfaatkan kedekatan lokasi dengan sumber penghidupan dan memperkuat jaringan sosial (Rakodi, 2002).

Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan perkotaan tidak hanya merupakan kondisi kekurangan, tetapi juga proses dinamis yang melibatkan interaksi antara faktor ekonomi, sosial, dan spasial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemiskinan perkotaan sebagai fenomena multidimensional melalui tiga aspek utama, yaitu bentuk, penyebab, dan dinamika kemiskinan, serta strategi bertahan yang dikembangkan oleh kelompok rentan di permukiman sempadan Sungai Cibeureum. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kemiskinan terbentuk dan direproduksi dalam konteks perkotaan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi perkotaan yang lebih kontekstual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus untuk menganalisis kemiskinan perkotaan sebagai fenomena multidimensional, khususnya terkait bentuk, penyebab, dinamika, dan strategi bertahan kelompok rentan. Lokasi penelitian berada di kawasan permukiman sempadan Sungai Cibeureum, Kelurahan Isola, Kota Bandung, yang dipilih secara purposif karena merepresentasikan kawasan marginal perkotaan dengan keterbatasan infrastruktur dasar dan kerentanan sosial ekonomi yang tinggi.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap 30 informan yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria kelompok rentan, seperti berpenghasilan rendah dan bekerja di sektor informal. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak menghasilkan temuan baru yang signifikan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari publikasi resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen pemerintah daerah, serta literatur ilmiah yang relevan dengan kajian kemiskinan perkotaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi fisik permukiman, karakteristik sosial ekonomi, serta pengalaman hidup masyarakat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan keterkaitan antar-tema yang berkaitan dengan bentuk kemiskinan, faktor penyebab, dinamika kerentanan, serta strategi bertahan masyarakat. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga informasi yang diperoleh dapat diuji konsistensi dan keakuratannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kemiskinan perkotaan tidak hanya sebagai kondisi ekonomi, tetapi sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor struktural, spasial, dan dinamika kehidupan sehari-hari masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Permukiman sempadan Sungai Cibeureum di Kelurahan Isola, Kota Bandung, merepresentasikan kawasan marginal perkotaan yang berkembang secara informal di tengah tekanan urbanisasi dan keterbatasan akses terhadap ruang kota yang layak. Secara fisik, kawasan ini ditandai oleh kepadatan bangunan yang tinggi dengan tingkat ketidakteraturan mencapai sekitar 70%, di mana sebagian besar hunian dibangun menggunakan material non-permanen seperti kayu bekas, seng, dan plastik. Pola permukiman yang tidak terencana ini tidak hanya mencerminkan keterbatasan ekonomi masyarakat, tetapi juga menunjukkan lemahnya kontrol tata ruang serta terbatasnya akses kelompok berpenghasilan rendah terhadap lahan formal.

Kondisi infrastruktur dasar di kawasan ini memperlihatkan adanya kesenjangan dalam penyediaan layanan perkotaan. Aksesibilitas lingkungan yang terbatas, ditandai oleh jalan sempit dan kualitas permukaan yang buruk, menghambat mobilitas serta memperkuat isolasi spasial kawasan. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap air bersih, sistem sanitasi yang belum memadai, serta pengelolaan limbah domestik yang kurang optimal menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya terlayani oleh sistem pelayanan dasar kota. Meskipun sistem drainase berfungsi di beberapa bagian, masih terdapat genangan saat hujan yang mengindikasikan kapasitas infrastruktur yang belum memadai dalam menghadapi tekanan lingkungan.

Lebih jauh, karakter permukiman ini tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan fisik, tetapi juga sebagai manifestasi dari ketimpangan struktural dalam pembangunan perkotaan. Minimnya pengelolaan persampahan serta terbatasnya sarana proteksi kebakaran menunjukkan rendahnya tingkat keamanan lingkungan, yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko. Dengan demikian, kondisi kawasan sempadan Sungai Cibeureum mencerminkan bagaimana keterbatasan akses terhadap infrastruktur, layanan dasar, dan ruang kota yang layak berkontribusi dalam membentuk lingkungan hidup yang rentan, sekaligus memperkuat keberadaan kemiskinan perkotaan sebagai fenomena yang bersifat multidimensional dan terikat secara spasial.

Bentuk Kemiskinan Perkotaan

Bentuk kemiskinan perkotaan di kawasan permukiman sempadan Sungai Cibeureum, Kelurahan Isola, Kota Bandung, merepresentasikan kemiskinan sebagai fenomena multidimensional yang termanifestasi melalui keterkaitan antara dimensi fisik, ekonomi, dan sosial dalam ruang perkotaan. Dari dimensi fisik, kemiskinan tercermin pada kualitas hunian yang tidak layak, ditandai oleh penggunaan material non-permanen, kepadatan bangunan yang tinggi, serta pola permukiman yang tidak teratur. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan keterbatasan ekonomi, tetapi juga mengindikasikan kerentanan spasial akibat keterbatasan akses terhadap lahan formal, yang menyebabkan sekitar 70% bangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses air bersih yang belum memadai, sistem sanitasi yang belum higienis, drainase yang belum optimal, serta

pengelolaan sampah yang tidak efektif sehingga memperlihatkan bagaimana kemiskinan terwujud dalam bentuk keterbatasan akses terhadap layanan dasar yang esensial bagi kualitas hidup.

Pada dimensi ekonomi, kemiskinan tercermin dari dominasi sektor informal sebagai sumber penghidupan utama masyarakat. Pekerjaan seperti buruh harian, pedagang kecil, dan pekerja serabutan menunjukkan rendahnya tingkat keamanan kerja dan ketidakstabilan pendapatan. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan keterbatasan ekonomi, tetapi juga membatasi kemampuan rumah tangga dalam melakukan mobilitas sosial dan akumulasi aset. Dengan demikian, kemiskinan ekonomi di kawasan ini tidak bersifat sementara, melainkan cenderung berkelanjutan karena keterbatasan akses terhadap peluang kerja yang lebih stabil dan produktif.

Sementara itu, pada dimensi sosial, kemiskinan tercermin melalui keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik. Meskipun secara spasial layanan tersebut tersedia di sekitar kawasan, kualitas dan keterjangkauannya masih menjadi kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Minimnya fasilitas publik seperti ruang terbuka dan sarana rekreasi, serta terbatasnya akses terhadap layanan administrasi, menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak dasar warga kota. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan material, tetapi juga mencerminkan keterbatasan dalam partisipasi sosial dan akses terhadap kehidupan perkotaan yang layak.

Secara keseluruhan, bentuk kemiskinan di kawasan ini tidak dapat dipisahkan dari struktur ruang kota yang tidak merata, di mana keterbatasan akses terhadap lahan, infrastruktur, dan layanan publik saling berinteraksi dalam membentuk kondisi kemiskinan yang kompleks. Dalam perspektif sosiologi perkotaan, kondisi ini menegaskan bahwa kemiskinan perkotaan merupakan hasil dari ketimpangan struktural yang termanifestasi secara spasial, sehingga memperkuat karakter kemiskinan sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan dimensi fisik, ekonomi, dan sosial secara simultan.

Penyebab Kemiskinan Perkotaan

Kemiskinan perkotaan di kawasan permukiman sempadan Sungai Cibeureum, Kelurahan Isola, Kota Bandung, tidak dapat dipahami sebagai akibat dari faktor tunggal, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara struktur ekonomi perkotaan, dinamika urbanisasi, dan keterbatasan kebijakan yang bersifat tidak inklusif. Dari perspektif struktural, tingginya harga lahan dan terbatasnya ketersediaan perumahan formal menciptakan hambatan sistemik bagi kelompok berpenghasilan rendah untuk mengakses hunian yang layak. Kondisi ini mendorong terbentuknya mekanisme eksklusi spasial, di mana masyarakat miskin secara tidak langsung terdorong untuk menempati ruang-ruang marginal seperti sempadan sungai yang berkembang secara informal dan tidak terencana. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi individu, tetapi juga merupakan konsekuensi dari distribusi ruang kota yang tidak merata.

Selain itu, urbanisasi berperan sebagai faktor pendorong yang memperkuat tekanan terhadap struktur kota. Arus migrasi ke kawasan perkotaan, yang didorong oleh harapan memperoleh peluang ekonomi yang lebih baik, tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja formal yang memadai. Keterbatasan keterampilan dan rendahnya daya saing tenaga kerja menyebabkan sebagian besar migran terserap ke dalam sektor informal. Dalam konteks ini, urbanisasi tidak hanya mencerminkan mobilitas penduduk, tetapi juga berkontribusi terhadap perluasan kantong-kantong kemiskinan perkotaan ketika tidak diikuti dengan integrasi ekonomi yang memadai.

Faktor ekonomi semakin memperkuat kondisi tersebut melalui dominasi pekerjaan di sektor informal yang ditandai oleh rendahnya pendapatan, ketidakstabilan penghasilan, serta ketiadaan jaminan sosial. Ketergantungan pada pekerjaan informal menciptakan kerentanan ekonomi yang tinggi, di mana rumah tangga sulit melakukan akumulasi aset maupun meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Dengan kata lain, sektor informal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme bertahan hidup, tetapi juga menjadi salah satu mekanisme yang mereproduksi kemiskinan dalam jangka panjang.

Di sisi lain, keterbatasan dalam implementasi kebijakan perkotaan turut memperkuat kondisi tersebut. Program penataan kawasan kumuh yang telah dijalankan pemerintah belum sepenuhnya mampu menjawab akar permasalahan kemiskinan, terutama karena masih berfokus pada aspek fisik tanpa diimbangi dengan intervensi sosial ekonomi yang memadai. Selain itu, kendala dalam koordinasi kelembagaan, keterbatasan pendanaan, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan menyebabkan efektivitas program menjadi terbatas. Dalam beberapa kasus, kebijakan relokasi juga tidak selalu menjadi solusi yang berkelanjutan, karena berpotensi memutus akses masyarakat terhadap sumber penghidupan yang selama ini menopang ekonomi mereka.

Secara keseluruhan, penyebab kemiskinan perkotaan di kawasan ini mencerminkan adanya keterkaitan erat antara faktor struktural, ekonomi, dan kebijakan yang saling memperkuat dalam membentuk kondisi kemiskinan yang bersifat multidimensional. Dalam perspektif sosiologi perkotaan, kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan semata-mata hasil dari kegagalan individu, melainkan merupakan produk dari sistem perkotaan yang belum sepenuhnya inklusif dalam mendistribusikan sumber daya dan kesempatan secara adil.

Dinamika Kemiskinan

Dinamika kemiskinan di kawasan permukiman sempadan Sungai Cibeureum, Kelurahan Isola, Kota Bandung, menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah kondisi yang statis, melainkan proses yang terus direproduksi melalui interaksi antara kerentanan ekonomi dan tekanan lingkungan. Dari aspek ekonomi, dominasi pekerjaan di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil menempatkan masyarakat dalam posisi yang rentan terhadap berbagai guncangan, seperti fluktuasi harga kebutuhan pokok dan terbatasnya peluang kerja. Ketidakpastian ini menyebabkan kondisi kesejahteraan rumah tangga bersifat fluktuatif, sehingga dalam situasi tertentu seperti kehilangan pekerjaan atau

penurunan pendapatan—masyarakat dengan cepat mengalami penurunan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana kemiskinan direproduksi melalui mekanisme ekonomi yang tidak stabil dan minim perlindungan sosial.

Di sisi lain, dinamika kemiskinan juga dipengaruhi secara signifikan oleh kerentanan lingkungan yang melekat pada lokasi permukiman. Keberadaan hunian di kawasan sempadan sungai, dengan kepadatan tinggi dan infrastruktur drainase yang terbatas, menjadikan masyarakat rentan terhadap banjir yang berulang, terutama pada musim hujan. Banjir tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik hunian, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi harian, mengurangi pendapatan, serta meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga untuk pemulihan. Selain itu, kondisi lingkungan yang tercemar akibat buruknya pengelolaan limbah dan keterbatasan sanitasi memperbesar risiko penyakit berbasis lingkungan, yang pada akhirnya turut menambah beban sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, faktor lingkungan tidak hanya menjadi risiko eksternal, tetapi berperan langsung dalam memperdalam kerentanan ekonomi.

Keterkaitan antara ketidakstabilan ekonomi dan risiko lingkungan tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di kawasan ini bersifat multidimensional dan berlangsung dalam suatu siklus yang saling memperkuat. Kerentanan terhadap banjir, misalnya, tidak hanya merupakan konsekuensi dari kondisi fisik permukiman, tetapi juga menjadi faktor yang mempersempit peluang mobilitas ekonomi masyarakat. Dalam perspektif sosiologi perkotaan, kondisi ini mencerminkan bagaimana struktur ruang kota yang tidak inklusif berkontribusi dalam mereproduksi kemiskinan, di mana kelompok rentan terperangkap dalam ruang-ruang berisiko tinggi tanpa kapasitas yang memadai untuk keluar dari kondisi tersebut. Oleh karena itu, dinamika kemiskinan di kawasan ini tidak hanya mencerminkan keterbatasan pendapatan, tetapi juga menunjukkan bagaimana interaksi antara faktor ekonomi, lingkungan, dan spasial membentuk dan mempertahankan ketimpangan sosial di perkotaan.

Strategi Bertahan dan Dinamika Adaptasi Sosial

Dalam konteks kemiskinan perkotaan sebagai fenomena multidimensional, masyarakat di permukiman sempadan Sungai Cibeureum, Kelurahan Isola, Kota Bandung, tidak hanya berada dalam posisi sebagai korban keterbatasan struktural, tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif mengembangkan strategi bertahan. Pilihan untuk tetap tinggal di kawasan tersebut, meskipun memiliki kondisi lingkungan yang tidak layak dan berisiko, menunjukkan adanya rasionalitas ekonomi yang kuat. Keterbatasan akses terhadap perumahan formal akibat tingginya harga lahan dan rendahnya pendapatan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan ruang-ruang marginal yang secara spasial dekat dengan sumber kehidupan. Kedekatan dengan lokasi kerja, khususnya di sektor informal, menjadi faktor kunci yang memungkinkan efisiensi biaya hidup, terutama dalam mengurangi pengeluaran transportasi dan menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Lebih jauh, strategi bertahan juga diwujudkan melalui penguatan jaringan sosial sebagai modal sosial yang penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Solidaritas antarwarga tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme bantuan informal, tetapi juga sebagai sistem pendukung yang memperkuat resiliensi komunitas dalam menghadapi tekanan struktural dan lingkungan. Dalam kondisi pendapatan yang fluktuatif, rumah tangga cenderung memprioritaskan pengeluaran pada kebutuhan dasar, sehingga ruang untuk investasi dalam peningkatan kualitas hunian menjadi sangat terbatas. Hal ini mendorong munculnya strategi adaptasi bertahap, seperti penggunaan material bangunan seadanya serta perbaikan hunian secara incremental sesuai kemampuan ekonomi. Selain itu, adaptasi terhadap kondisi lingkungan juga menjadi bagian penting dari strategi bertahan. Pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk akses air dari lingkungan sekitar, serta toleransi terhadap risiko banjir dan pencemaran, menunjukkan bahwa masyarakat mengembangkan bentuk-bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan infrastruktur yang ada. Dalam perspektif sosiologi perkotaan, praktik-praktik ini tidak dapat dipahami sebagai bentuk ketidakberdayaan, melainkan sebagai survival strategy yang rasional dalam konteks keterbatasan pilihan yang tersedia.

Temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan perkotaan di kawasan tersebut merupakan hasil dari interaksi antara keterbatasan ekonomi, ketimpangan spasial, dan dinamika sosial yang kompleks. Kondisi permukiman yang tidak layak, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, serta kerentanan terhadap risiko lingkungan memperkuat karakter kemiskinan multidimensi yang dialami masyarakat. Pada saat yang sama, keberadaan permukiman di sempadan sungai mencerminkan proses marginalisasi perkotaan, di mana kelompok rentan terdorong ke ruang-ruang yang kurang bernilai dalam struktur kota akibat distribusi sumber daya yang tidak merata. Dengan demikian, strategi bertahan yang dikembangkan masyarakat tidak hanya mencerminkan upaya mempertahankan hidup, tetapi juga menjadi indikator bagaimana kemiskinan direproduksi sekaligus dinegosiasikan dalam konteks struktur perkotaan yang tidak inklusif.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan perkotaan di permukiman sempadan Sungai Cibeureum, Kelurahan Isola, Kota Bandung, merupakan fenomena yang bersifat multidimensional dan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keterbatasan pendapatan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kemiskinan termanifestasi dalam bentuk keterbatasan fisik melalui kondisi hunian yang tidak layak dan minimnya infrastruktur dasar, keterbatasan ekonomi akibat dominasi pekerjaan informal dengan pendapatan tidak stabil, serta keterbatasan sosial dalam akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara dimensi ekonomi, sosial, dan spasial dalam membentuk pengalaman kemiskinan di tingkat lokal. Lebih lanjut, penyebab kemiskinan di kawasan ini tidak hanya bersumber dari faktor individual, tetapi terutama dipengaruhi oleh struktur perkotaan yang tidak inklusif, seperti tingginya harga lahan, terbatasnya akses terhadap perumahan formal, serta

tekanan urbanisasi yang mendorong kelompok rentan untuk menempati ruang-ruang marginal. Dalam konteks ini, kemiskinan mencerminkan proses marginalisasi spasial, di mana distribusi sumber daya dan ruang kota berlangsung secara tidak merata. Dinamika kemiskinan yang terjadi juga memperlihatkan adanya siklus kerentanan yang berulang, yang dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi dan diperkuat oleh risiko lingkungan seperti banjir. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah keadaan statis, melainkan proses yang terus direproduksi oleh interaksi antara faktor ekonomi dan lingkungan. Namun demikian, masyarakat tidak sepenuhnya pasif, melainkan mengembangkan berbagai strategi bertahan yang rasional, seperti memanfaatkan kedekatan lokasi dengan sumber penghidupan, memperkuat jaringan sosial, serta beradaptasi terhadap keterbatasan lingkungan. Dengan demikian, kemiskinan perkotaan dalam penelitian ini tidak hanya merefleksikan kondisi kekurangan, tetapi juga menunjukkan dinamika adaptasi sosial dalam menghadapi keterbatasan struktural.

Berdasarkan temuan penelitian, penanganan kemiskinan perkotaan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Bagi pemerintah, diperlukan penguatan kebijakan penanganan kawasan kumuh yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses pekerjaan yang lebih stabil serta program pemberdayaan yang berkelanjutan. Kebijakan yang inklusif juga perlu dikembangkan untuk memastikan kelompok rentan memiliki akses terhadap perumahan layak tanpa harus terdorong ke ruang-ruang marginal. Dalam konteks perencanaan kota, diperlukan pendekatan penataan sempadan sungai yang tidak hanya menitikberatkan pada relokasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat, seperti kedekatan dengan sumber penghidupan dan jaringan sosial yang telah terbentuk. Penyediaan hunian layak dan terjangkau perlu diintegrasikan dengan sistem transportasi dan pusat aktivitas ekonomi agar tidak memutus mata pencaharian masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of public economics*, 95(7-8), 476-487.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Kota Bandung dalam angka 2025.
- David Satterthwaite. (2017). The impact of urban development on risk in sub-Saharan Africa. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 26, 1-7.
- Harvey, D. (2025). 'The Right to the City': New Left Review (2008). In *The City Reader* (pp. 296-305). Routledge.
- Habitat, U. N. (2020). *World Cities Report 2020, The Value of Sustainable Urbanization*, Nairobi.
- Jonathan Rigg. (2012). Unplanned development: Tracking change in Southeast Asia. *World Development*, 40(11), 2145-2154.
- Kementerian PUPR. (2016). Peraturan tentang peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Satterthwaite, D. (2017). The impact of urban development on risk in sub-Saharan Africa's cities with a focus on small and intermediate urban centres. *International journal of disaster risk reduction*, 26, 16-23.

Tony Rakodi. (2002). A livelihoods approach – Conceptual issues and definitions. *Urban Studies*, 39(1), 3–22.

UN-Habitat. (2020). *World cities report 2020: The value of sustainable urbanization*.